

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aswanto dan Wilma Silalahi. 2021. *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok; Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.

Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Prenadamedia Group.

----- . 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Makassar; Phinatama Media.

Fadli Andi Natsif. 2020. *Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta; Kencana.

Hamzah Halim, et.al. 2023. *Eksaminasi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Paniai)*. Bantul-Jogjakarta; Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.

Harifin A. Tumpa. 2011. *Reformasi Mahkamah Agung RI*. Yogyakarta; Rangkang Education.

Haryanto. 2017. *Elit, Massa, dan Kekuasaan: suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta; Penerbit PolGov.

Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan* (Edisi Revisi). Yogyakarta; Mirra Buana Media.



Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok; PT RajaGrafindo Persada.

-----, 2010. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta; Sinar Grafika.

Kadarudin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang; Formaci.

-----, 2020. *Isu-Isu Hukum Kejahatan Internasional & HAM Dalam Catatan Dr. Kadarudin*. Sleman; Penerbit Deepublish.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

Majda El Muhtaj. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta; Kencana.

Natsir Asnawi. 2020. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta; UII Press Yogyakarta.

Ruslan Renggong dan Dyah Amaliah Rachma Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta; Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana.



-----, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.

HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok; Rajawali Pers, PT Grafindo Persada.

Romi Librayanto. 2013. *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*. Makassar; Arus Timur.

R. Wiyono. 2015. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta; Prenadamedia Group.

Simon. 2009. *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta Pusat; Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional.

Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta; Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).

Yusri Munaf. 2014. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru-Riau; Marpoyan Tujuh.

----- . 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru-Riau; Marpoyan Tujuh.

Jurnal:

Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi. Vol. 7 No. 5. 2010.

Ateng Syafruddin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Universitas Parahyangan. Vol. 4. 2000.



Permanasari, “Tanggung Jawab Komando menurut Hukum nasional dan Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum Humaniter. 1 No. 1. 2005.

Benadito Rompas, “*Tanggung Jawab Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional*”, Lex Privatum. Vol.5 No. 2. 2017.

Danel Aditia Situngkir, “*Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional*”, Jurnal Litigasi ejournal.unpas.ac.id. Vol. 19. 2018.

Kariawan. A.M, Haerani, dan Karyati, S. *Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*. Unizar Rechr Journal. Vol. 1 No. 4. 2022.

Efendy, R. *Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 3 No. 1. 2014

Skripsi:

Javier Maramba Pandin. 2023. *Analisis Hukum Internasional Terhadap Prinsip Pertanggungjawaban Komando Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.

Andini Osama Leideni. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Paniai Papua (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)*. Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin.



nand Fachri Haekal. 2023. *Analisis Yuridis Independensi Hakimstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus*

Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat).

Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.

Rini Rezqinakhlah Amalia. 2024. *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan).*

Fajlurrahman Jurdi. *Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Tesis:

Andi Ilham Taufik Ramli. 2022. *Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak dan Relevansinya Dengan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.

Ilyas Satriaji. 2022. *Implementasi Kebijakan Operasi Militer Di Papua Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Disertasi:

Joko Setiyono. 2010. *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum,



Universitas Diponegoro

dan Perundang-Undangan:

Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pusat Penelitian Pengembangan Mahkamah Agung RI 2000 yang menerjemahkan Undang-Undang Roma Pengadilan Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*).

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Internet:

sumbawa.ntb.polri.go.id. (2021). Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri, dari <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>

Abdurrahman Sayuti, Mahasiswa Fakultas Hukum Unja; <https://www.unja.ac.id/reformasi-penegakan-ham-di-indonesia/>

Latuharhary, Pemerintahan Demokratis Menjamin HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/13/1095/pemerint>

1-demokratis-menjamin-ham.html



Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya, Renata Christha Auli, S.H., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>

Pengertian, Sejarah, dan Asas Hukum Pidana Internasional, Renata Christha Auli, S.H., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-internasional-lt632858f404e49/>

Utami Argawati, Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>

Khairunas, SH. MH., Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power), <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>

Ilman Hadi, S.H., Prinsip Tanggung Jawab Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/-siapa-yg-berbuat-dia-yg-bertanggung-jawab--lt4fee9b5e8c4d6/>

BBC Indonesia, Sidang perdana kasus Paniai: Korban anggap 'penghinaan', pegiat sebut 'sandiwara hukum', <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c10p7389pjpo>

CR-8, Komnas HAM Papua sebut Papua bukan wilayah konflik, <https://jubi.id/tanah-papua/2024/komnas-ham-papua-sebut-papua-bukan-wilayah-konflik/>



Ady Thea DA, Imparsial Sebut Pengiriman Pasukan ke Papua Bermasalah Secara Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/imparsial-sebut-pengiriman-pasukan-ke-papua-bermasalah-secara-hukum-1t630de7b73eb55/>

ELSAM, *Paradoks Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat Paniai: Negara Tak Serius Mengawal Keadilan Korban!*, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/paradoks-penegakan-hukum-pelanggaran-ham-berat-paniai-negara-tak-serius-mengawal-keadilan-korban>

mpr.go.id, *Hentikan Pembunuhan dan Teror KKB di Papua, Negara Harus Tegas*, <https://www.mpr.go.id/berita/Hentikan-Pembunuhan-dan-Terror-KKB-di-Papua,-Negara-Harus-Tegas>

mkri.id, *Indonesia Belum Ratifikasi Statuta Roma*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19032>

